

## TAJUK RENCANA

### Dinasti Parlemen

**SEBANYAK** 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah masa bakti 2024-2029 telah dilantik, awal Oktober lalu.

Menarik, ternyata dinasti politik masih menjadi tradisi. Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilantik, sedikitnya 79 di antaranya terafiliasi dengan dinasti politik, dengan indikator mempunyai relasi kekerabatan dengan pemangku kekuasaan dan elite partai, mulai di tingkat kepala daerah hingga pejabat di tingkat pusat.

Peningkatan angka dinasti politik di DPR untuk periode 2024-2029 menunjukkan tren yang meningkat, dianggap mengkhawatirkan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 174 anggota DPR terindikasi memiliki keterkaitan dengan dinasti politik, yang mencakup sekitar 30% dari total anggota. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya, di mana pengaruh dinasti politik dianggap lebih rendah.

Hal tersebut telah memicu kekhawatiran di berbagai kalangan pengamat tentang kualitas demokrasi di Indonesia.

Antara lain pada dampak negatif pada proses pemilihan. Partai politik cenderung memilih calon dari dinasti karena mereka sudah memiliki nama dan sumber daya, sehingga mengabaikan kandidat yang lebih berkualitas tetapi kurang dikenal. Hal ini menciptakan siklus di mana kekuasaan hanya berputar di kalangan elit saja.

Itulah yang kemudian dianggap bisa menyebabkan pengabaian aspirasi publik. Anggota DPR yang berasal dari dinasti mungkin lebih fokus pada kepentingan keluarga mereka daripada aspirasi masyarakat luas. Ini berpotensi menyebabkan regulasi dan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat.

Hal tersebut bisa berdampak pada implikasi sosial dan ekonomi. Mengapa? Dinasti politik sering kali dikait-

kan dengan praktik nepotisme, di mana kekuasaan dan anggaran negara digunakan untuk memperkuatkan posisi keluarga tertentu. Hal ini dapat menimbulkan beban sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Hal tersebut juga menunjukkan keterbatasan dalam kaderisasi. Dengan dominasi dinasti, peluang bagi kader-kader baru yang berkualitas untuk naik ke posisi strategis menjadi sangat terbatas. Ini menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dalam sistem politik.

Karena itu, perlu diingatkan organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memantau politik dinasti dan memobilisasi dukungan untuk perubahan. Mereka dapat melakukan penelitian, menyusun laporan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Antara lain, misalnya dapat mempertimbangkan reformasi dalam sistem pemilu untuk membatasi praktik dinasti politik, seperti pembatasan jumlah anggota keluarga yang dapat bertugas dalam jabatan politik yang sama atau berturut-turut. Ini juga termasuk penerapan aturan etika yang ketat di partai politik.

Dalam hal ini, peran media juga penting. Media independen harus diberdayakan untuk melakukan investigasi terhadap praktik dinasti politik. Jurnalisme yang kuat dapat membantu mengungkap nepotisme dan jika ada praktek korupsi serta meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari dinasti politik.

Partai politik diharapkan mampu membangun sistem rekrutmen elit dan kaderisasi yang lebih baik, dengan mengutamakan merit sistem. Ini berarti setiap orang harus melewati proses penjurangan secara berjenjang, seperti di birokrasi, sehingga tidak ada lagi yang mendadak jadi calon ketua partai atau kepala daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemantauan terhadap kebijakan dinasti politik di parlemen dapat dilakukan secara efektif, sehingga menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil. (\*\*\*\*)-d

# Menguji Kelayakan Sirekap Pilkada

Muhammad Johan Komara

KPU kembali akan menggunakan Sirekap pada Pilkada tahun ini. Hal tersebut disampaikan pimpinan KPU saat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah pada 25 September lalu. Kebijakan ini patut diapresiasi di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas dan kecepatan informasi.

Menurut Masataka Kimura (2015), problem utama pemilu konvensional adalah inefisiensi dan kecurangan (*fraud*). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemilu diyakini mampu mengatasi persoalan tersebut.

Dalam konteks Pilkada, melalui Sirekap publik dapat segera memantau hasil suara pasangan calon dalam beberapa jam setelah waktu coblosan selesai. Dan mestinya paling lama 1x24 jam, seluruh data TPS bisa diketahui hasilnya di daerah yang terjangkau internet.

Meski hasil tabulasi masih sementara namun bisa digunakan sebagai alat kontrol untuk memastikan hasil penghitungan suara di TPS sama jumlahnya dengan angka rekapitulasi suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten / Kota atau KPU Provinsi. Dan jika ada perbaikan maka publik pun akan mudah mengawalinya.

Berbeda dengan Situng, Sirekap wajib dipakai pada proses rekapitulasi. Hal ini persis dengan Sidalih yang juga harus digunakan saat rekapitulasi daftar pemilih secara berjenjang. Karena statusnya sebagai alat bantu yang bersifat integral, maka penting untuk memastikan bahwa Sirekap benar-benar teruji dan layak pakai.

Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu masih ditemukan beberapa persoalan. Problem klise masih terjadi. Ketika diakses banyak orang tiba-tiba saja ngadat. Dan yang lebih fatal adalah kesalahan sistem. Di mana teknologi OCR dan OMR gagal membaca dan mengkonversi angka secara akurat. Akibatnya suara perolehan calon di banyak TPS tiba-tiba menggelembung bertambah melebihi jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut.

Agar Sirekap Pilkada dapat berjalan

lancar dan akurat perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, kapasitas *server* yang memadai. Ini bisa ditempuh dengan memanfaatkan komputasi *cloud* dari Google, Microsoft, IBM, Amazon atau Alibaba. Kelima layanan *cloud* tersebut cukup mumpuni dalam mengelola *big data* dan *big traffic*. Jika opsi ini dianggap riskan secara politis karena keberadaan *server* di luar



KR-JOKO SANTOSO

negeri, maka bisa menggunakan *cluster computer system* di KPU.

Mudahnya, ada *server* utama dan *server feeder* (*server* pembantu). *Server feeder* dapat dibuat sesuai jumlah provinsi (38), kabupaten/kota (514) atau berbasis regional. Jika ada 1 *server feeder* yang *overload* dan sampai *down*, tidak akan mempengaruhi *server* lain, upaya perbaikan bisa lebih cepat di lakukan, serta konsolidasi data antar *server* pun bisa lebih mudah dan cepat.

Kedua, fitur kontrol. Formulir rekapitulasi memiliki tiga elemen kunci yaitu jumlah pengguna hak pilih (A), jumlah surat suara yang digunakan (B), serta jumlah suara sah dan tidak sah (C). Logika tiga elemen, dibangun dengan argumen bahwa [A = B = C]. Apabila terdapat satu elemen yang jumlahnya tidak sama dengan elemen yang lain berarti ada yang salah.

Adalah tidak logis jika hasil perolehan suara di sebuah TPS melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Harusnya Sirekap memiliki fitur *auto control*. Jika logika tiga elemennya tidak valid maka proses input data ditolak oleh sistem secara otomatis.

Ketiga, uji coba massal. Kemampuan Sirekap dalam mengelola data-data TPS perlu dicoba secara masif terlebih dahulu. Uji coba tidak hanya parsial tetapi secara nasional terstruktur sampai di level TPS. KPPS dibentuk 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Setelah dibimtek, KPPS bisa langsung diberi tugas untuk uji coba aplikasi Sirekap versi beta.

Ujicoba ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kelayakan Sirekap. Apakah ngadat saat dipakai banyak pengguna. Apakah akurasi OCR dan OMR sudah 99,9% atau masih 51%, apakah fitur *auto control* Sirekap sudah ada dan berfungsi dengan baik, apakah SDM KPPS dan PPK sudah pada faham semua atau masih ada yang gaptek. Itu semua perlu diuji.

Apabila dilakukan pembenahan dan pengujian *hardware*, *software* maupun SDM secara komprehensif, Sirekap dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mewujudkan

Pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel. (\*)

\*)**Muhammad Johan Komara**, Wakil Ketua Lembaga Ta'li'wan Nasyr (LTN) PWNW DIY, Peneliti Senior JaDI DIY.

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
**Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

**Wartawan:** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Kejahatan 'Grooming' Usia Sekolah

Lucia Anung Wargiati

**BELAKANGAN** ini media sosial (medsos) dihebohkan beredarnya video mesum guru dan siswi di Gorontalo. Dikutip dari kompas.com, penyidik PPA Polda Gorontalo, Brigadir Polisi Jabal Nur menyampaikan video tersebut memperlihatkan tindak asusila antara oknum guru dan siswinya yang berhubungan seksual. Setelah ditelusuri lebih dalam, oknum guru tersebut telah mendekati korban semenjak 2022. Tahun 2023, oknum gurunya lebih ekstrem menyentuh siswa yang yatim piatu tersebut. Terbuai perhatian yang diberikan oknum guru tersebut, kejadian tersebut terulang kembali Januari 2024. Publik mengecam kejadian tersebut apalagi terjadi di dalam dunia pendidikan dan terus berulang.

Tindakan atau perilaku orang yang lebih dewasa kepada anak-anak/remaja usia sekolah yang ujungnya memaksa korban agar terlibat dalam aktivitas seksual sering dikenal dengan nama *grooming*. Dikutip dari *Connecticut Alliance to End Sexual Violence*, *grooming* merupakan upaya orang yang lebih dewasa membangun kepercayaan kepada anak-anak atau remaja/usia sekolah yang ujungnya memaksa korban terlibat dalam aktivitas seksual. Perilaku *grooming* yang terjadi pada anak-anak atau remaja/usia sekolah sering dikenal dengan *child grooming* bisa dikatakan tindakan negatif karena pelaku rentan melakukan melecehkan dan mengeksploitasi korban dengan dalih menyakinkan lingkungan sekitar bahwa anak atau remaja tersebut aman dalam pengawasannya. Selain itu mengubah pikiran anak membangun kepercayaan dan mengikat emosi anak lewat hubungan romantis sehingga korban lekat dengannya untuk tujuan eksploitasi dan pelecehan seksual, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Kasus kekerasan seksual guru-murid Gorontalo bisa dikategorikan dengan *child grooming*. Pasalnya, pelaku memanfaatkan kerentanan korban sebagai yatim piatu lantas memanipulasi

lasinya agar melakukan hubungan seksual dengannya. Pelaku membangun hubungan asmara, membuat korban merasa pelaku mengayominya dan memberi perhatian lebih, sehingga membuatnya merasa nyaman.

Dampak yang terjadi korban *grooming* biasanya mengalami kesulitan tidur, cemas atau kesulitan untuk berkonsentrasi atau mengerjakan tugas sekolah. Sementara itu, lama-kelamaan mereka mungkin juga akan menjadi menarik diri, tidak komunikatif dan marah atau kesal karena selalu teringat perilaku pelaku menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dampak panjangnya sendiri dapat hidup dengan kecemasan dan depresi. Apalagi mengalami tindakan seksual yang berulang kali menjadi trauma sampai dewasa.

Kejahatan *grooming* telah dilarang sejak Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak pada tahun 1921. Untuk itu peran masyarakat ataupun keluarga terdekat dan paling dekat (jika anak yatim piatu) sangat penting untuk mencegah kejahatan *grooming* tersebut tidak terkecuali pendidik untuk melindungi masa depan anak-anak ataupun anak-anak yang menuju usia remaja. Langkah praktisnya yaitu mengenali apa itu *child grooming* baik itu bahayanya dan tanda-tandanya. Selanjutnya memberikan pemahaman kepada anak-anak/usia remaja tentang membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk teman sebaya dan orang dewasa yang dapat dipercaya dengan cara

yang terbuka. Terlebih menanamkan kata "tidak" pada kontak fisik yang tidak nyaman atau tidak diinginkan.

Jalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, terutama yang memiliki masalah emosional, kesepian, atau sedang mencari perhatian dan dukungan emosional. Pastikan mereka merasa nyaman membicarakan pengalaman dan perasaan mereka dengan orangtua atau orang yang lebih dipercaya terutama topik-topik seksual dalam percakapan ataupun di mana pelaku mulai memaksa atau memanipulasi korban untuk melakukan tindakan seksual ataupun permintaan foto atau video tidak senonoh dan tindakan lain yang melibatkan kontak fisik maupun non-fisik.

Tunjukkan bahwa kita peduli kepada usia anak sekolah dan mendukung masa pertumbuhannya. Pastikan bahwa mereka datang kepada orang-orang yang bisa dipercaya sehingga dapat membantu untuk keluar dari situasi yang dialaminya tersebut ataupun ketika merasa tidak nyaman dengan situasi tertentu sehingga dapat terhindar dari kejahatan *grooming*. (\*)

\*)**Lucia Anung Wargiati SPd**, Guru TK Kencana Melati Kulonprogo.

## Pojok KR

KPU: Kunci suasana kondusif Pilkada, taat aturan.

- Para kontestan harus bisa menjaga.

\*\*\*

Masuk pancaroba, waspadai ISPA.

- Jangan abaikan penyakit yang lain.

\*\*\*

Cegah stunting, gemar makan ikan digalakkan.

- Sekaligus persiapan menuju Indonesia Emas.

Berita